

**POTRET KEMEROSOTAN MORAL
DALAM DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA:
SEBUAH KRITIK DARI ABDURRAHMAN**

oleh:
Arif Rohman
(Dosen FSP FIP-UNY)

Abstract

The education is convinced to play an important role in solving and providing the way out upon the present social problem. One of the important results of educational implementation is the progress of science and technology proved to be able to assist mankind in solving the problem. Ironically, if the educational implementation practice it self contains the problem, for example degradation of morality in education. Therefore, in order to solve such a condition, an effort is needed to reconstruct morality to return the main mission of education for the manifestation of the Indonesian societal typology which is within morality and just prosperity.

Key words: degradation of morality, education, reconstruction.

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai sampai dewasa ini, di samping telah membawa kepada tingginya peradaban dengan segala kemudahan hidup yang diperoleh umat manusia juga telah membawa dampak kurang menggembarakan. Beberapa dampak anti klimaks dari kemajuan tersebut adalah merebaknya aneka problem sosial, seperti : aids, kriminalitas, perlombaan senjata nuklir, polusi, inflasi, dan krisis energi. Demikian keprihatinan Fritjof Capra (1997) terhadap kondisi masyarakat modern dewasa ini.

Aneka problem sosial yang bersifat global dewasa ini di samping disebabkan dari ekkses kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkadang kurang memperhatikan keseimbangan sosio-ekologis sebagaimana telah disebut, namun yang lebih penting sebenarnya adalah akibat merosotnya moralitas manusia. Kemerossotan moralitas manusia tersebut bahkan terjadi secara kelewat batas sampai pada akhirnya melewati kewajaran. Kemerossotan moralitas manusia tersebut pada gilirannya mengarah kepada bentuk perilaku moral manusia yang bersifat destruktif.

Kemerosotan moralitas manusia di atas menurut Muhammad Abdurrahman (2003) berpangkal dari penyelenggaraan pendidikan modern yang kurang berlandaskan moralitas. Pendidikan modern menurutnya telah jauh dan kering dari hakekat nilai-nilai spiritual sebagai sumber tegaknya moralitas. Oleh karena itulah Muhammad Abdurrahman dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan di Alaf Baru : Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan (2003)* menawarkan sebuah perspektif dalam rangka meluruskan kembali perilaku moral manusia melalui rekonstruksi atas moralitas pendidikan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah potret demoralitas penyelenggaraan pendidikan Indonesia dewasa ini terjadi?. Bagaimanakah wujud rekonstruksi moral pendidikan sebagai upaya pemecahan atas problem tersebut?.

B. Pembahasan

1. Keprihatinan atas Moralitas Pendidikan

Dewasa ini kondisi pendidikan tengah mengalami keprihatinan, bahkan Mansour Fakhri (Francis Wahono, 2001) menyebut bahwa pendidikan mengalami suatu ancaman. Ancaman ini muncul baik dari adanya intervensi dan ekspansi pihak luar seperti penguasa dan pengusaha yang berusaha menjadikan pendidikan sebagai alat bagi mereka, tetapi juga ancaman yang bersumber dari dalam seperti penataan dan penyelenggaraan oleh pelaku pendidikan yang sekedar formalistik, ritualistik, dan konservatif (Illich, 1971; Freire, 2002).

Penyelenggaraan pendidikan yang sekedar formalistik, ritualistik, dan konservatif tersebut pada gilirannya telah menjauhkan diri dari upaya-upaya kritis dalam pencarian kekurangan segenap dimensi penyelenggaraan pendidikan yang ada, terutama kepada hal-hal paling mendasar. Hal mendasar itu menurut Muhammad Abdurrahman adalah menyangkut moralitas pendidikan.

Menurut pandangan Muhammad Abdurrahman (2003) praktek penyelenggaraan pendidikan modern di Indonesia telah menunjukkan indikator yang telah menyimpang dari kaidah-kaidah moralitas (*akhlak*). Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan telah bergeser dari yang bersifat spiritualistik kepada hal-hal yang bersifat sekularistik dan materialistik, dari

yang bercorak profetik berubah menjadi pragmatik, dan substantif lambat laun menjadi periferialistik. Pada intinya menurut Muhammad Abdurrahman, penyelenggaraan pendidikan Indonesia modern lambat laun telah kehilangan fitrah moralitasnya.

Potret penyelenggaraan pendidikan yang menyimpang dari kaidah-kaidah moralitas (*akhlak*) tersebut pada gilirannya juga menghasilkan lulusan yang kurang memiliki moralitas terpuji dalam dirinya. Moralitas yang dimaksud adalah yang mencakup tiga tataran, yaitu : pengetahuan moral (*moral knowing*), penghayatan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral action*).

Pada bagian lain, corak dan perkembangan praktek pendidikan sangat terkait erat dengan tipologi masyarakat dalam mana praktek pendidikan berlangsung. Antara tipologi praktek pendidikan dengan tipologi masyarakatnya merupakan dua hal yang paralel dan terkait satu sama lain. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan menurut Fagerlind dan Saha (1983), keduanya membentuk hubungan saling mempengaruhi yang bersifat dialektis. Satu sisi pendidikan adalah produk masyarakat, namun di sisi lain pendidikan mempengaruhi masyarakat dengan menumbuhkan perubahan-perubahan.

Kondisi masyarakat Indonesia adalah sosok masyarakat dengan jumlah besar yang mayoritas muslim. Sebagai masyarakat yang menghimpun diri dalam suatu negara yang penduduknya mayoritas muslim tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini merupakan potensi yang luar biasa bila mampu dioptimalkan perannya. Namun realitasnya, kuantitas yang besar tersebut tidak didukung oleh kualitas dan kekompakan serta loyalitas manusia muslim terhadap sesama, agama, dan fakir miskin yang mayoritasnya adalah kaum muslimin.

Perbincangan mengenai masyarakat sebenarnya sangat terkait dengan tiga konsep dasar yang memiliki konotasi yang hampir sama yaitu: *daulah* (*negara*), *mulk* (*penguasa*), dan *umran* (*peradaban*). Istilah masyarakat dalam terminologi Al-Qur'an dinyatakan dengan istilah *ummah*, yakni sebuah komunitas muslim yang hidup bersama dalam rangka tunduk dan taat kepada *syariah*, adat istiadat dan peradaban Islam. Mereka selalu melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak ke arah kebaikan dan menyeru untuk meninggalkan

kejahatan), *amal sholih* (tindakan terpuji), saling tolong menolong, dan *ukhuwah insaniyah* (saling rukun dan mencintai antar sesama).

Pengertian *ummah* berasal dari kata dasar *amm* yang bermakna 'tujuan' atau 'maksud', pun pula bisa berasal dari kata *umm* yang artinya 'ibu'. Namun dalam pengertian kedua ini (*umm*), kata *ummah* tidak sekedar berkonotasi pada makna ibu pertiwi dalam batas-batas wilayah geografis, namun lebih mengandung arti tauhid dan iman yakni kolektivitas yang diikat oleh keimanan dan ideologi persamaan dan persaudaraan. Sehingga yang disebut masyarakat Islam (*Islamic society*) adalah masyarakat yang di dalamnya hidup antar sesama yang selalu memegang teguh *syariah*, berani dan ikhlas dalam mempertahankan eksistensi, harga diri, dan ketauhidannya dari segala ancaman atau ideologi yang berusaha memusnahkannya.

Masyarakat Islam menurut Muhammad Abdurrahman (2003) memiliki karakteristik: (1) sebagai masyarakat etis, (2) masyarakat ketauhidan, dan (3) masyarakat persaudaraan. Masyarakat Islam yang hidup di zaman modern dewasa ini disarankan berani menghadapi berbagai jenis rintangan dan halangan berupa ideologi Barat, teknologi modern, sekularisme dan peradaban budaya Barat. Dalam pandangan Muhammad Abdurrahman (2003), para pemimpin Islam dari negara-negara Islam telah gagal menggerakkan dan memobilisasi ummat dikarenakan mereka telah menjadi sekutu paling dekat atau kawan karib pemerintah Barat. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Abdul Hamid Abu Sulayman, yang menyebutkan: "*Jelas-jelas para pemimpin Islam telah melupakan kewajibannya*".

Tipologi masyarakat yang telah mendistorsikan dirinya dari nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan tersebut pada gilirannya juga melahirkan tipologi pendidikan yang distorsif. Pendidikan yang baik menurut Muhammad Abdurrahman (2003) adalah pendidikan yang mempunyai falsafah dan tujuan-tujuan tertentu yang jelas. Falsafah dan tujuan pendidikan adalah terbentuknya pribadi utuh yang memiliki akhlak dan sopan santun serta penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keseharian.

Falsafah dan tujuan pendidikan yang demikian itu mendasarkan atas hadits yang berbunyi: "*innamaa bu'istu li utammima makaarima! akhlaaq*", yang berarti: aku diutus ke dunia ini adalah dalam rangka menyempurnakan budi pekerti/akhlak. Atas dasar ini maka

orientasi utama dari proses pendidikan Islam adalah upaya setinggi-tinggi membentuk pribadi muslim yang *berakhlakul karimah*.

Orang yang memiliki *akhlakul karimah* diyakini akan selalu bertindak adil, mampu beramal sholikh, amar ma'ruf nahi munkar, peduli terhadap sesama dan fakir miskin, serta memiliki komitmen terhadap tegaknya nilai-nilai religius. Mengenai amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kaidah agama yang berbunyi : "*man ra'a minkum munkaaaron fal yughoyyir biyadih, faillam yastati' fabillisaanih waillam yastati' fabiqolbih, ala wahiya ad'aful imaan*" (barang siapa di antara kalian menemui kemungkaran di muka bumi ini maka hendaklah engkau perbaiki melalui kekuasaanmu, tetapi bila engkau tidak mampu hendaklah perbaiki melalui perkataanmu, itupun masih tidak mampu maka gunakan melalui hatimu, ingat sesungguhnya yang demikian itu adalah yang paling lemah iman).

Akhlakul karimah tersebut mencakup 5 (lima) dimensi kehidupan, yaitu: *pertama*, *akhlakul karimah fardhiyyah*, yakni perilaku moral yang baik dalam konteks dan untuk kepentingan bagi diri sendiri atau individu yang bersangkutan. Misalnya perilaku bermoral ketika makan, tidur, berpakaian, mau mandi, dan lain-lain. *Kedua*, *akhlakul karimah usariyyah*, adalah perilaku moral yang baik dalam konteks hidup di dalam keluarga atau berkeluarga. Misalnya: perilaku bermoral ketika menyapa anak, menemui istrinya, memimpin keluarga, membesarkan anak, dan lain-lain.

Ketiga, *akhlakul karimah ijirma'iyyah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup di kemasyarakatan. Dalam hal ini perilaku bermoral seseorang seperti : selalu menyapa dengan ramah, murah senyum dengan orang lain, rajin silaturahmi, suka menolong, selalu bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, lapang dada dalam memberi maaf orang lain, dan lain-lain.

Keempat, *akhlakul karimah daulah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup bernegara. Antara lain berperilaku baik berupa taat peraturan dan taat kepada pemimpin. *Kelima*, *akhlakul karimah diniyyah*, yaitu perilaku moral yang baik dalam konteks hidup beragama.

Untuk mampu menghasilkan lulusan berupa manusia yang *berakhlakul karimah* di atas, diperlukan adanya seorang pendidik atau guru yang relevan. Guru yang diperlukan menurut

pendapat Qazi Ibnu Jama'ah (Muhammad Abdurrahman, 2003) adalah sosok guru yang tidak pernah absen membaca kitab suci sambil menghayati maknanya. Sosok guru yang Ideal adalah penghafal kitab suci (*al khafidh*). Hal ini disebabkan tugas guru adalah sebagai pendakwah dan penyebar risalah tauhid baik di dalam kelas maupun di luar kelas atau di tengah-tengah masyarakat sebagai tokoh panutan.

Seorang guru yang baik adalah sosok yang murah senyum, sabar, berperilaku baik terhadap orang-orang miskin, berani menanggung kebutuhan fakir miskin, dan menyayangi muridnya. Sehingga sosok guru adalah yang memiliki kualitas dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan, moral, dan cinta atau loyal kepada agama.

Guru yang kurang baik adalah mereka yang tidak mampu menjadikan dirinya sebagai pendakwah dan penegak tauhid. Guru yang apatis terhadap kondisi kemerosotan moral di masyarakat tergolong ikut terlibat sebagai jahiliyyah atau *konspirasi jahiliyyah*. Menurutnya, *konspirasi jahiliyyah* adalah semua pihak yang perbuatannya apatis terhadap kebiadaban dan kesengsaraan umat. Termasuk guru dan ulama yang diam karena takut terhadap adanya kebiadaban di tengah-tengah masyarakatnya.

Beberapa kritik Muhammad Abdurrahman atas kondisi demoralitas pendidikan Indonesia di atas oleh beberapa kalangan dirasakan memiliki sisi positif sebagai bentuk apresiasi kepadanya. Lebih-lebih pada era dewasa ini kondisi demoralitas tersebut telah merambah ke hampir seluruh dimensi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk kondisi yang oleh para ahli disebut fenomena komersialisasi pendidikan. Ketika banyak lembaga pendidikan yang menaikkan pungutannya kepada siswa dengan dalih untuk peningkatan layanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru, pada gilirannya telah mendorong kepada mahalnya biaya pendidikan. Dengan demikian menjadikan kritik dari Muhammad Abdurrahman mendapat relevansinya.

Namun demikian beberapa kritik atasnya juga patut diberikan secara proporsional dalam rangka menimbang secara adil antara segi positif dan negatifnya. Beberapa kritik wajar kepadanya adalah: *pertama*, isi tulisan pada bukunya dalam melihat kondisi demoralitas pendidikan terlalu hitam putih, sehingga aneka pemikiran tentang moral beserta dialektika pemikiran-pemikiran tersebut hampir-hampir tidak ada. Bahkan dalam hat tertentu terkesan

mengarah kepada pandangan fundamentalis, misalnya mengenai konsep *jahiliyyah* yang beliau artikan sebagai semua perilaku atau pun peradaban yang dibangun bukan atas dasar nilai-nilai Islam. Peradaban modern Eropa yang dibangun bukan atas dasar Islam termasuk peradaban *jahiliyyah*.

Kedua, penawaran pemikiran dari penulis tentang rekonstruksi atas moralitas pendidikan kurang tampak jelas. Tentang rekonstruksi seperti apa dan bagaimana melakukan rekonstruksi moralitas pendidikan masih sangat kabur. Oleh karena itu, buku ini terkesan hanyalah semacam keprihatinan dan gugatan semata atas kondisi yang ada.

Ketiga, struktur pemikiran dalam buku Muhammad Abdurrahman masih belum padu dan masih belum terbangun secara utuh. Hal ini dapat dimaklumi mengingat buku ini disusun atas dasar kumpulan artikel penulisnya yang pernah dimuat di beberapa media massa serta tulisan-tulisan lain yang relevan dari penulis.

Keempat, emosi penulis sangat nampak dalam tulisan bukunya dengan kata lain *subyektivitas* dirinya terlalu masuk, sehingga kurang jernih dalam mengupas suatu sub topik. Lebih-lebih ketika membahas persoalan mengenai Aceh, penulis terlalu larut dan emosinya masuk ke dalam tulisannya dengan menghujat GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan menghujat pula pemerintah Republik Indonesia.

Kelima, isi tulisan terlalu normatif. Dalil-dalil agama yang diambil dari teks-teksi kitab suci banyak dikutip begitu saja dan ditafsirkannya secara tekstual sehingga dikesankan kurang memberikan tafsir secara kontekstual. Akibatnya adalah pengutipan dan penafsiran atas teks kitab agama tersebut kering dari argumen-argumen rasional. Contohnya ketika Muhammad Abdurrahman menyebut ciri-ciri masyarakat. Menurutnya ciri masyarakat yang baik adalah masyarakat yang di dalamnya menjunjung tinggi kerjasama, dengan mengutip dalil Hadits: "*wa'tashimuu bikhablillaahi jamii'awwala tafarroquu*" (hendaklah kamu selalu menjaga kesatuan dan kerjasama serta janganlah saling terpecah belah).

2. Menegakkan Kembali Moralitas Pendidikan

Dengan memperhatikan kenyataan akan demoralitas pendidikan tersebut banyak kalangan yang mengkhawatirkan akan masa depan Indonesia. Praktek pendidikan yang telah susah

payah diselenggarakan dikhawatirkan berujung pada kondisi `kontra-produksi` yang pada akhirnya tidak saja merusak dunia pendidikan itu sendiri tetapi juga dapat merusak tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk itu, upaya untuk mengembalikan kondisi moralitas pendidikan sangat dibutuhkan.

Beberapa langkah yang diperlukan dalam mengembalikan tegaknya moralitas pendidikan adalah: *pertama*, praktek penyelenggaraan pendidikan perlu *khittah* kepada misi sebenarnya yaitu pembebasan. Pendidikan sebagai praktek pembebasan menurut Syafii Maarif (1991) dengan mengutip Paulo Freire, adalah pendidikan yang dapat 'menolong manusia untuk meningkatkan sikap kritis terhadap dunia dan dengan demikian mengubahnya'. Penegasian terhadap misi pembebasan ini sama artinya dengan penolakan terhadap fitrah pendidikan sebagai wahana peningkatan kualitas kemanusiaan.

Kedua, oleh karena penyelenggaraan pendidikan mengandung misi pembebasan, maka segala perangkat dan pendukung yang ada seperti guru, kunkulum, manajemen, model pembelajaran, sistem evaluasi, peraturan-peraturan yang diciptakan dan lain-lain keseluruhannya perlu diorientasikan kepada misi pembebasan tersebut. Dengan kata lain segenap perangkat dan pendukung terselenggaranya pendidikan tidak diperbolehkan berproses bertentangan dengan misi pembebasan. Sehingga bisa diilustrasikan, bila hal pertama diasumsikan sebagai 'roh' yang melandasi tindakan mendidik maka hal yang kedua diibaratkan sebagai jasad yang berindak dalam praksis pendidikan.

Ketiga, setelah kokoh dari segi roh alias misi profetisnya beserta implementasi praktek pendidikan yang dilakukan oleh komunitas pendidik, maka langkah selanjutnya adalah pengikisan terhadap aneka praktek yang pendidikan sebagaimana telah *dimaksud* di atas. Aneka praktek distorsi penyelenggaraan pendidikan misalnya: komersialisasi pendidikan, praktek pembelajaran anti dialog, pelunturan norma-norma susila dan agama dalam praktek pergaulan antar insan pendidikan, dan pengebirian indikator mutu lulusan hanya sekedar selebar ijazah.

Dari ketiga langkah-langkah yang telah diutarakan di atas diharapkan moralitas pendidikan dapat ditegakkan kembali. Tegaknya kembali moralitas pendidikan berarti juga tegaknya wibawa pendidikan. Sehingga aneka praktek pendidikan yang cenderung

distorsif secara pelan-pelan dapat dieliminir sedikit demi sedikit yang pada gilirannya akan dapat dihilangkan secara permanen.

C. Penutup

Bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam rangka ikut memecahkan dan memberikan jalan keluar atas kemelut aneka macam problem sosial. Akan tetapi bila praktek pendidikan yang di dalamnya mengidap problem tersendiri akan mengalami kesulitan bahkan akan gagal dalam menjalankan misinya. Salah satu di antara problem yang dialami oleh dunia pendidikan adalah hilangnya nilai-nilai moralitas dalam praktek pendidikan. Oleh karenanya rekonstruksi atas moralitas pendidikan sangat perlu dilakukan. Namun penulis buku "*Pendidikan di Araf Baru : Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*" ini belum memberikan jawaban yang rekonstruksi secara tegas dan jelas.

Beberapa langkah yang diperlukan dalam rangka mengembalikan tegaknya moralitas pendidikan sebagai upaya rekonstruksi adalah melalui mengembalikan praktek penyelenggaraan pendidikan kepada *khittah-nya* yaitu mengembalikan kepada misi pembebasan. Oleh karena penyelenggaraan pendidikan mengandung misi pembebasan, maka segala perangkat dan pendukung yang ada seperti guru, kurikulum, manajemen, model pembelajaran, sistem evaluasi, peraturan-peraturan yang diciptakan dan lain-lain keseluruhannya perlu diorientasikan kepada misi tersebut. Langkah berikutnya adalah pengikisan terhadap aneka praktek yang mendistorsikan nilai luhur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Capra, Fritjof. 1997. *Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Bentang Budaya
- Abdurrahman, Muhammad. 2003. *Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fagerlind, Ingemar and Saha, Lawrence J. 1983. *Education and National Development*. New York: Pergamon Press.
- Freire, Paulo. 2000. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Read.
- Illich, Ivan. 1971. *Deschooling Society*. New York: Harrow Books.
- Maarif, Syafii. 1991. *Pemikiran tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, dalam Muslih Usa. 1991. *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Wahono, Francis. 2001. *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.